

Kemitraan Strategis dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisataaan di Provinsi Jawa Barat

Imas Soemaryani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran,
Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40132, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keyword : Strategical partnership, HR Development, Halal tourism industry, Tourism curricula.</p>	<p><i>The low visit of foreign tourists to West Java was allegedly because the government had not optimized all available opportunities, one of which was the halal tourism program. This research was conducted using focus group discussions, starting from the initial data collection, secondary data collection and deepening and verification of field data, while the data analysis method used was descriptive analysis. The results of the study conclude that the real integration of partnerships between government and academia is to prepare educational institutions that are capable of supporting tourism development, and the educational institutions themselves apply it by compiling various curricula that are in line with market needs; the community and tourism business activities that are able to see and take market opportunities, both domestically and abroad.</i></p>
<p>Kata kunci: Kemitraan Strategis, Pengembangan SDM, Industri Wisata Halal, Kurikulum Kepariwisataaan</p>	<p>SARI PATI</p> <p>Masih rendahnya kunjungan wisatawan asing ke Provinsi Jawa Barat disinyalir karena pemerintah belum mengoptimalkan semua peluang yang ada, salah satunya adalah program wisata halal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan focus group discussion, mulai dari pengumpulan data awal, pengumpulan data sekunder dan pendalaman serta verifikasi data lapangan, sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif. Hasil studi menyimpulkan bahwa integrasi kemitraan antar pemerintah dan akademisi yang nyata adalah menyiapkan lembaga lembaga pendidikan yang mampu mendukung pengembangan pariwisata, dan lembaga pendidikan itu sendiri mengaplikasikannya dengan menyusun berbagai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar; masyarakat dan aktivitas usaha kepariwisataan yang mampu melihat serta mengambil peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.</p>
<p>Corresponding Author: imas_isyani@yahoo.com</p>	<p>© 2019 Perwira. All rights reserved.</p>

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report tahun 2015-2016 terlihat bahwa, pengeluaran umat Muslim dunia pada 2014 di sektor makanan dan minuman halal serta gaya hidup mencapai US\$ 1,8 triliun atau sekitar 11,6 persen dari total pasar global. Sedangkan sektor makanan dan minuman halal memberikan kontribusi terbesar, yaitu US\$ 1.128 miliar atau 17 persen dari total pasar global sebesar US\$ 6.755 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh 5,8 persen hingga mencapai US\$ 1.585 miliar dolar pada 2020 dan sektor travel kontribusinya sebesar US\$ 142 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh hingga mencapai US\$ 233 miliar," ujar dia. Sementara sektor fashion, kontribusinya sebesar US\$ 230 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh hingga mencapai US\$ 327 miliar. Sektor media dan rekreasi kontribusinya sebesar US\$ 179 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh hingga mencapai US\$ 247 miliar.

Jika melihat data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa peluang untuk memasuki pasar wisata halal yang di dalamnya termasuk wisata kuliner halal, wisata fashion, rekreasi dan media yang memenuhi nilai-nilai islami sangat besar. Berangkat dari hal ini maka diperlukan adanya integrasi dari seluruh unsur yang terkait untuk terus meningkatkan kualitas dan kehalalan produknya dan jasanya, sehingga dampak gandanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalahnya adalah, kemitraan strategis yang terintegrasi dari semua unsur yang terlibat mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat diakui belum terintegrasi dengan baik, Arogansi peran dari masing-masing unsur masih sulit dipertemukan, maka tugas pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan untuk mengkoordinir semua kepentingan ini agar bisa bersama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan peran nya masing-masing.

Salah satu unsur yang memberikan peran penting adalah unsur akademisi yang memiliki peran untuk menyiapkan sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, mulai dari menyiapkan lembaga pendidikan yang tepat, menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar serta menyiapkan berbagai program pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal terkait dengan pengembangan kepariwisataan.

Masalah lain yang sering muncul adalah sering tumpang tindihnya program kerja antar instansi terkait yang memiliki peran yang sama untuk pengembangan SDM baik itu untuk pelaku usaha maupun untuk fasilitator dari aktivitas kepariwisataan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model kemitraan strategis yang terintegrasi dalam menyiapkan dan melaksanakan program pengembangan SDM melalui penyusunan kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar sehingga mampu mendukung pada pengembangan industri pariwisata halal di provinsi Jawa Barat.

TUJUAN

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini bertujuan untuk menyusun sebuah model kemitraan strategis pengembangan sumberdaya manusia industri wisata halal melalui penyusunan kurikulum kepariwisataan berbasis peluang dan kebutuhan pasar industri pariwisata di Jawa Barat. Diharapkan dari hasil kajian ini akan diperoleh gambaran tentang peran masing-masing unsur khususnya pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat dalam menyusun program pendidikan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengelola kepariwisataan, dan pada akhirnya mampu memberikan layanan prima bagi para wisatawan yang datang ke Jawa Barat.

METODE

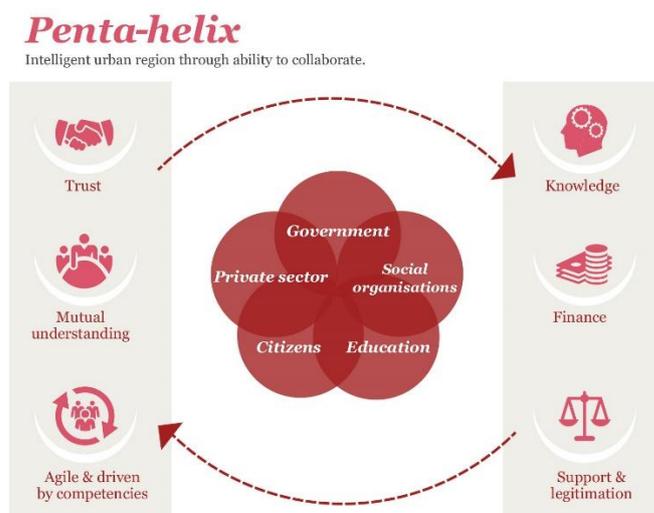
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *focus group discussion*, mulai dari pengumpulan data awal, pengumpulan data sekunder dan pendalaman serta verifikasi data lapangan, sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan kemitraan strategis melalui penyusunan kurikulum yang mampu mendukung persiapan pengadaan dan pengembangan sumberdaya manusia di sektor wisata halal.

Karena yang menjadi objek penelitian ini adalah semua unsur yang terlibat dalam pengembangan wisata halal berbasis Pentahelix, maka FGD ini dihadiri oleh pihak; (i) pemerintah itu sendiri yang diwakili oleh dinas pariwisata, dinas perindustrian perdagangan; (ii) pihak pelaku usaha dalam hal ini para pengusaha yang bergerak di bidang hotel, restoran, travel dan fashion; (iii) pihak akademisi yang diwakili oleh para pimpinan akademi dan sekolah tinggi pariwisata; (iv) pihak media yang diwakili oleh Trans TV, PR dan: (v) pihak masyarakat yang diwakili oleh asosiasi pengusaha hotel dan restoran, asosiasi pengusaha fashion.

KAJIAN PUSTAKA

Kemitraan strategis (*strategic partnership*) merupakan cara memperluas bisnis yang tidak dapat dilakukan sendiri. Dalam skema ini ada dua atau beberapa pihak yang terkait melihat adanya peluang untuk bermitra membentuk sinergi saling menguntungkan. Kemitraan ini harus didasari keyakinan dan kepercayaan yang terbangun melalui pengalaman dan pengamatan. Dalam kemitraan, pihak-pihak terkait berpikir positif dan optimistis dengan semangat gairah yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan. Bentuk model kemitraan yang sedang dikembangkan adalah Pentahelix model.

Gambar 1. Penta-helix model



Pentahelix model ini pada intinya adalah sebuah model kolaborasi atau kemitraan lima unsur atau pihak yaitu unsur ABCGM, atau akademisi, business (perusahaan), *community* atau komunitas, *government* atau pemangku kebijakan serta media atau jurnalis.”. Kolaborasi pentahelix ini akan mempercepat pengembangan kemampuan pelaku wirausaha menjadi usaha kreatif miliaran (UKM), yang salah satunya adalah usaha Fashion. Ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan dari suatu kemitraan strategis.

Konsep kemitraan strategis ini kemudian diaplikasikan di dalam program pengembangan SDM dalam rangka mendukung pengembangan wisata halal di provinsi Jawa Barat.

Konsep wisata halal dalam kajian ini berarti wisata yang memenuhi unsur syariah yang bersumber dari agama Rahmatanallamiin ini berdasarkan syariat Islam atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam penetapan wisata halal atau tidaknya perlu adanya sertifikasi apakah wisata tersebut halal ataupun tidak yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN-MUI. Selanjutnya penulis akan fokus pada wisata syariah.

Selanjutnya, terdapat konsep wisata yang tergolong baru di Indonesia, yakni konsep wisata syariah yang merupakan gabungan dari wisata dan syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah syariat Islam. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

“Konsep Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.” (www.parekraf.go.id diakses pada 01 Mei 2016).

Sementara itu, pengertian syariah sendiri yang terdapat dalam *Tarikh Tasyri’ Al-Islami, Manna’ Qathan* yang dikutip dari Hery Sucipto. dan Fitria Andayani (2014:38), menyatakan bahwa

“Syariah adalah semua aturan yang diturunkan Allah untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk”.

Jadi, wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Karena harus tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan juga akhlak, maka tentunya jenis wisata ini memberikan batasan-batasan kepada wisatawan syariah agar nyaman dalam bersyariah. Padahal, jika melihat pada pengertian dari wisata yang ditujukan untuk rekreasi yang identik dengan kegiatan untuk bersenang-senang, wisata syariah dapat saja dikatakan tidak relevan. Sebagai seorang wisatawan, tentunya mereka akan cenderung untuk melakukan perjalanan tanpa ada batasan-batasan yang mengikat pada dirinya. Namun, ternyata ada sekelompok orang yang selalu berusaha untuk memperhatikan syariat, termasuk dalam melakukan perjalanan. Oleh karena itu, wisata syariah dihadirkan untuk memfasilitasi mereka yang tetap ingin memperhatikan syariat dalam berwisata, termasuk di dalamnya mengkonsumsi yang halal dan juga tetap tidak menyalahi syariat Islam, serta tidak meninggalkan ibadah ketika berwisata.

Menurut Chukaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran wisata syariah dari segi administrasi dan pengelolannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan;
8. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari karakteristik wisata syariah yang dijabarkan Chukaew (2015), terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu wisata syariah.

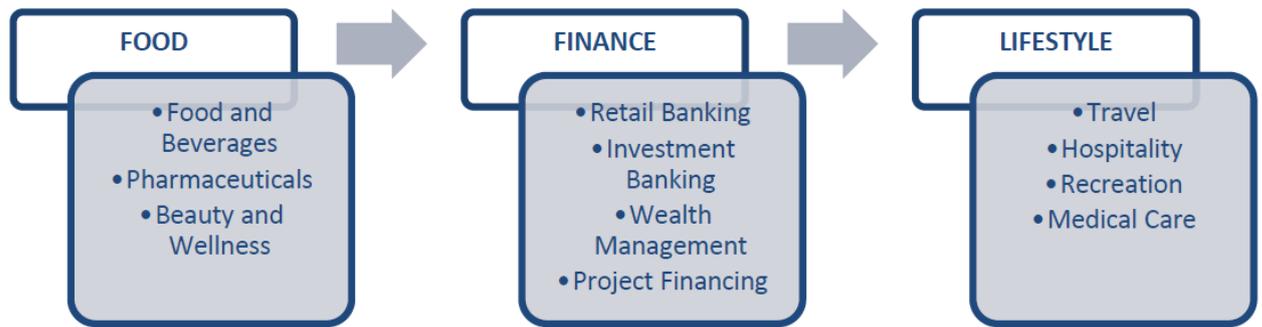
1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area riwisata. Lokasi wisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
2. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan (Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo 2014).
3. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata (Moira, 2012).
4. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg (dalam Sahida, 2011), pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Pada kajian memfokuskan pada kesiapan sumber daya manusia dalam menjawab tantangan wisata syariah khususnya hotel syariah. Kesiapan sumber daya manusia dapat dilihat dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh SDM pengelolaan hotel syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan badan Pengurus harian DSN MUI (di kutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id> tanggal akses 3 mei 2016) sebagai berikut :

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
2. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab.
3. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika islam
4. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah” (Pergub NTB Nomor 51 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9, dari pengertian tersebut penulis menggunakan pendekatan wisata halal berarti wisata yang memenuhi unsur syariah yang bersumber dari agama Rahmatanallamiin ini berdasarkan syariat Islam atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Esensi syariah tidak hanya mengkomsumsi makanan dan minuman dalam konteks halal, halal disini juga dijelaskan mengapa makanan tersebut dikatakan halal dan layak dikomsumsi. Perusahaan asal Singapura, *Crescentrating* memberikan suatu data tentang evolusi *industry syariah*, (*Crescent Rating*, 2015 diakses melalui <https://www.crescentrating.com/> pada tanggal 1 Mei 2016), seperti gambar berikut :



Gambar 1.1 Evolusi Industri Syariah

Sumber : Crescent Rating, 2015

Pada gambar 1.1 telah menunjukkan bahwa Produk syariah telah mengalami perkembangan, setelah makanan, industri produk perbankan syariah juga sangat baik perkembangannya. Di Indonesia, sudah banyak makanan dan minuman halal, lalu industri syariah ini berkembang tingkat perbankan dan gaya hidup (*lifestyle*) mulai muncul pula hotel syariah akibat gaya hidup syariah. Dengan melihat karakteristik di atas, maka unsur yang terlibat dalam pengembangan SDM harus mampu menyiapkan kurikulum yang outcomenya mampu memenuhi kebutuhan di atas.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Unsur akademisi adalah salah satu unsur yang ada di dalam Pentahelix yang terkait langsung dengan perannya untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang siap pakai dan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Peran nyata dari unsur lembaga pendidikan adalah dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan baik formal maupun informal dari mulai strata D1 sampai dengan S1 dan jenjang pendidikan lanjutan untuk strata S2 dan S3. Peran nyata lain dari unsur pendidikan adalah menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar yang terkait langsung dengan aktivitas pariwisata.

Di Jawa Barat sendiri beberapa akademi dan universitas yang tercatat sebagai lembaga penyelenggara pendidikan terkait dengan kepariwisataan adalah:

- Akademi Pariwisata Bumiputera Wiyata
- Akademi Pariwisata Nasional Indonesia
- Akademi Pariwisata NHI
- Akademi Pariwisata Pertiwi Bekasi
- AKTRIPA & STIEPAR YAPARI AKTRIPA
- Bogor Hotel Institute
- LPP Ariyanti
- Manajemen Perhotelan UNTAG PRIMA Cirebon
- Manajemen Perhotelan Politeknik Padjadjaran
- PPLP Sandhy Putra Bandung
- Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Bentuk kemitraan strategis yang dilakukan oleh unsur pemerintah dan pelaku usaha salah satunya adalah dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI, Kota Bandung untuk berkolaborasi. Kerjasama dua belah pihak tertuang dalam

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani langsung Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra dan Ketua STP Bandung Anang Sutono. Kerja sama mutipihak juga dilakukan STP dengan *Box institute Australia, Institut Sains* dan Teknologi Pradita, Balai Besar Tekstil Bandung, Politeknik Pariwisata Palembang, Espin Multimedia, dan Negara Bagian Victoria. Penandatanganan dilakukan di Kampus STP Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Senin 6 November 2017 usai kegiatan wisuda pasca sarjana, diploma IV dan III. Hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur serta Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (<https://bijb.co.id/kolaborasi-pt-bijb-stp-bandung-kuatkan-mutu-sdm-pariwisata-jawa-barat/>)

Kerja sama PT BIJB dan STP Bandung, ini nantinya akan melingkupi pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan BIJB sebagai gerbang pariwisata ke depannya. Dengan kerja sama STP Bandung yang dinaungi langsung Kementerian Pariwisata dan dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tentu akan menjadi langkah baik untuk pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat. Dan diharapkan Lulusan kepariwisataan seperti di STP ini mampu memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia baik dari kuantitas maupun dari sisi vokasionalnya, sehingga keahlian inilah yang nanti mampu mendukung pada peningkatan kinerja kepariwistaan di Jawa Barat.

Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang mengembangkan wisata halal dalam rangka mengoptimalkan peluang wisata yang bisa dimasuki, khususnya untuk menjaring wisatawan muslim baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengembangkan empat pilar pengembangan industri wisata halal. Ke empat pilar ini adalah:

1. Kebijakan dan Regulasi

Dalam hal kebijakan dan regulasi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas pariwisata dan budaya menetapkan; (a) komitmen pemerintah pusat dan daerah yang mendukung penuh pada setiap kegiatan terkait dengan pengembangan wisata halal; (b) mengeluarkan dan atau menetapkan kebijakan/regulasi yang menstimulasi pertumbuhan industri wisata halal dan; (c) menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung tumbuh kembangnya industri wisata halal.

2. Pemasaran dan Promosi ; kegiatan mencakup integrasi kompanye pariwisata dan gaya hidup halal Indonesia dalam dan luar negeri secara agresif bagi target pasar utama, mencakup strategi pemasaran, strategi promosi dan strategi pada media.

3. Pengembangan destinasi dan industri, aktivitas ini mencakup pengembangan atraksi, aksesibilitas, amenitas industry, produk dan jasa.

4. Peningkatan Kapasitas, yang mencakup: (a) pengembangan sertifikasi kompetensi SDM; (b) kesadaran/dukungan dari komunitas dan stakeholder serta;(c) pengembangan/ sertifikasi industri nya itu sendiri.

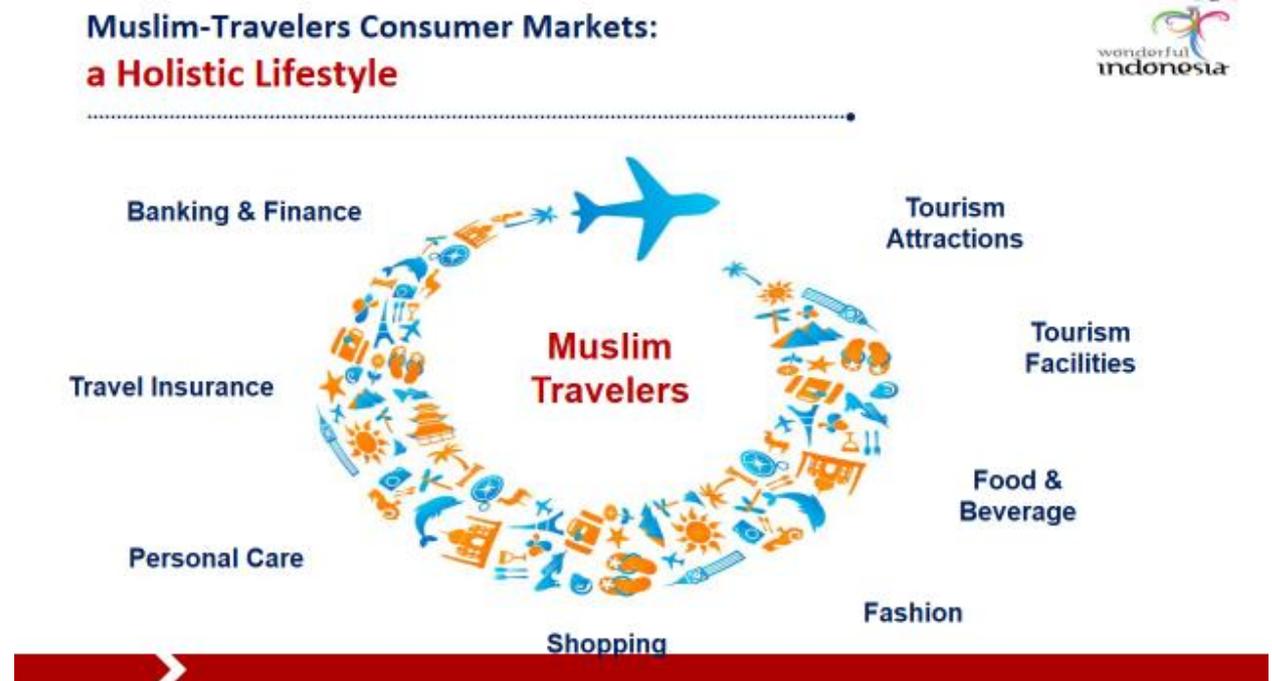
Dari sisi akademisi juga menetapkan beberapa pilar yang menjadi dasar dalam mengembangkan kegiatan akademiknya. Beberapa pilar ini mencakup:

1. Menentukan atribut atau kriteria wisata syariah, seperti minimal hotel yang masuk kategori hotel syariah adalah yang memiliki kriteria (a) *hotel meeting the religious needs of patrons*; (b) *place of worship*; (c) *availability of halal food*; (d) *Banning of alcohol consumption andgambling, sexual permissivines dan drescode (Mohammed Battour, journal of torism research)*.

2. Menentukan Mulim- Trabeles Consumer Markets

Ini mencakup berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan dalam melaksanakan wisata halal. Secara lebih lengkap bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2:



- Menentukan kebutuhan turis selama melaksanakan wisata halal. Beberapa kebutuhan telah diidentifikasi sebagai berikut:

Halal/Syaria compliant food/restaurant

Halal Hotels

Prayer rooms/area

Kiblat sign

Musholla (prayer mat)

Copy of al-quran

Prayer calls

Muslim employee properly dressed

No alcohol

Muslim Toilet

Safe and secure destination

Information guide on islamic tourism destination

Legal business

Value for money package

Easy to access

Good shopping

Source : Islamic Forum in Malaysia

- Menentukan jenis-jenis Akomodasi wisata halal, yang sudah teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

Halal food – the number one way of meeting the needs of Islamic travellers,

Prayer facilities – prayer rooms, mats and kiblah direction in all tourism components,
Female swimming – it will ensure female Islamic guests feel as comfortable as possible,
Spa facilities – a separate female spa ensures travelers in planning their holidays,
Qur'an in hotel rooms – a strong welcoming message to our Islamic guests.
Alcohol free options – not only in hotel restaurants and rooms, also in transportation,
Islamic TV channels – not just western channels,
Female housekeeping and room staff – providers must be sensitive to this concerns,
Bathing suits – an offer to Islamic women of covering up while in the spa, pool or beach,
Middle-Eastern menu – one effective way of tempting Islamic travellers, and non-Islam,

5. Menentukan ruang lingkup wisata halal, dan hal ini sudah disepakati dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Hotels adopting sharia values
Halal food and drinks
Sharia fashion
Sharia tourist attractions
Sharia cosmetics and SPA
Sharia art performances

Berdasarkan lima hal ini maka lembaga lembaga pendidikan yang berperan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumberdaya manusia terkait kepariwisataan berperan untuk menyusun program pendidikan yang mengarah pada pengembangan wisata halal. Kurikulum pendidikan terkait dengan wisata halal adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kurikulum inti wisata halal

Berdasarkan kepada output dan outcome dari program pendidikan ini, maka ditentukan kurikulum inti mencakup:

- *Islam and tourism: theory and practice*
- *Arabic for tourism*
- *Islamic psychology and tourism*
- *Cross-cultural understanding*
- *Sharia business and management*

2. Menentukan subjek Kurikulum, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Konsep Pariwisata Halal
- Kebutuhan Muslim Dalam Berwisata
- Kriteria Usaha Pariwisata Halal
- Kriteria Paket Wisata Halal
- Kriteria Destinasi Wisata Halal
- Kriteria Tourist Guide Pariwisata Halal
- Kriteria Pengolahan Makanan dan Minuman Halal

3. Menentukan mater *Training Contents for Volunteers/In house guides*, yang mencakup:

- *The concept of the guided Mosque tour*

- *The benefits of open-house approach*
- *The basics of interactions with visitors*
- *Step by step approach for conducting mosque tours*
- *Presenting Islamic faith and culture to non-Muslims*
- *Techniques of answering Questions to non-Muslims*

5. Menentukan **Atribut Syariah dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Masjid / Musholla**

Halal Food and Beverage di Kitchen, Pastry and Restaurant dan Hotel Praktik

Islamic Uniform for Muslim

Green and Syariah Tourism Campus and Building

Islamic Event and Forum

Student Islamic Board

Book / Journal Islamic of Tourism

Islamic Sign and Materials

Subject and Modul Religion

Clean and Hygine

6. Menentukan faktor pendukung dalam Pendidikan karakter wisata islami atau wisata halal halal. Terdapat empat hal yang pokok yang dijadikan dasar dalam pengembangan nilai nilia luhur dan perilaku berkarakter. Ke empat karakter yang dibentuk dalam secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

Empat Olah Dalam Pendidikan Karakter



Gambar 3: Empat Olah dalam pendidikan karakter

Keempat olah dalam pendidikan karakter ini pada saat diaplikasikan ke dalam pendidikan karakter islami menjadi karakter-karakter seperti di bawah ini. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.

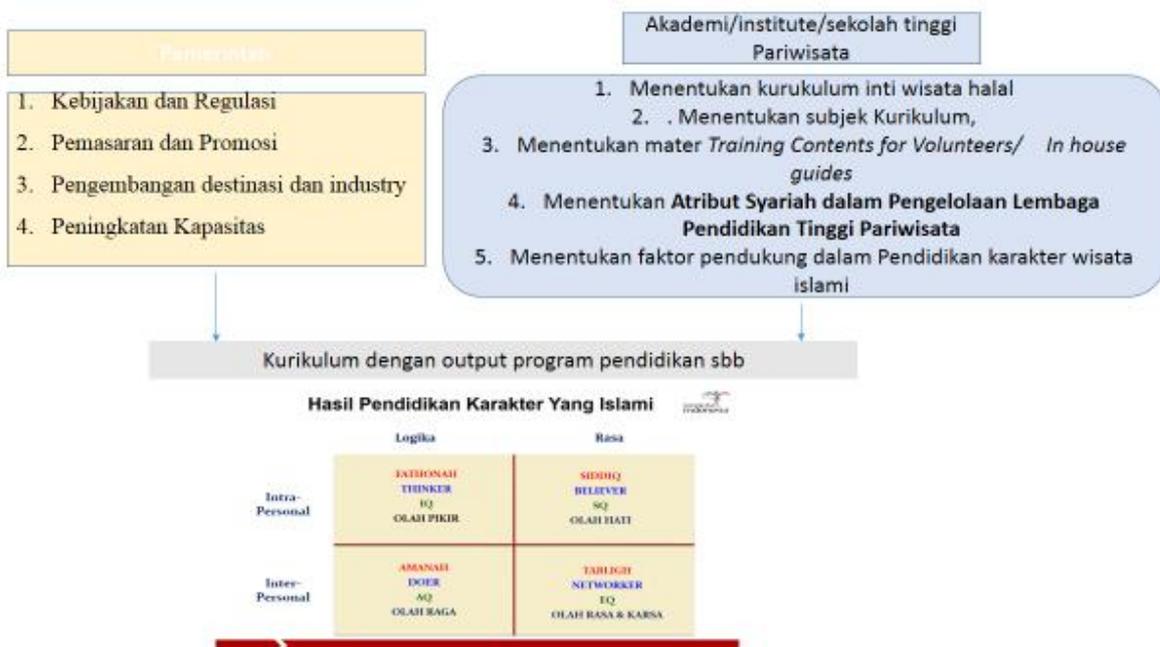
Hasil Pendidikan Karakter Yang Islami



	Logika	Rasa
Intra-Personal	<p>FATHONAH THINKER IQ OLAH PIKIR</p>	<p>SIDDIQ BELIEVER SQ OLAH HATI</p>
Inter-Personal	<p>AMANAH DOER AQ OLAH RAGA</p>	<p>TABLIGH NETWORKER EQ OLAH RASA & KARSA</p>

Gambar 4. Hasil pendidikan karakter yang islami

Dari uraian di atas, paradigm kemitraan strategis antara pemerintah dan akademisi adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Kemitraan strategis pemerintah dan pelaku/akademisi

KESIMPULAN

1. Kemitraan strategis antara pemerintah dengan pihak akademisi dalam hal ini para pelaku tenaga pendidik dan pelaku usaha yang mengelola lembaga pendidikan terkait dengan pengembangan wisata Sariah/wisata islami/wisata halal di Provinsi Jawa Barat sudah terjalin cukup baik, yang dibuktikan dengan adanya memorandum dalam pengembangan program studi dan pengembangan kurikulum yang mampu mendukung pada pengembangan wisata halal.
2. Kedua unsur dalam pengembangan pendidikan pariwisata sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing masing, meskipun belum optimal karena unsur lain seperti unsur masyarakat dan media belum dilibatkan secara penuh.

SARAN

Perlunya integrasi kepentingan dari semua unsur yang terlibat dalam pengembangan wisata halal khususnya melalui pengembangan program studi dan kurikulum wisata halal, sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal. Beberapa unsur yang masih harus dilibatkan adalah unsur media, masyarakat dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua unsur maka diharapkan output maupun outcomes dari program pendidikan betul betul dapat sesuai dengan kebutuhan pasar baik dilihat dari segi kuantitasnya maupun dari segi kompetensi sumberdaya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business and Management*, III (7), 277-279.
- Hery Sucipto. dan Fitria Andayani. (2014). *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. Jakarta Selatan : Grafindo
- M. Ma'aruf Abdullah, (2012). *Manajemen Berbasis Syariah*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Moehariono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. (2012). The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry. *International Journal of Culture and Tourism Research*, 5 (1), 129-140.
- Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal
- Rezeki, S. Reza Irwansyah. 2011. *Strategi Komunikasi "Change Management" (Studi Kasus : Perubahan Konsep Bisnis dari Hotel Konvensional ke Hotel Syariah)*. Jurnal Semai Komunikasi Vol. II No. 1.
- Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C. (2011). The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*. 17, pp. 138-142. Singapore: IACSIT Press.
- Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo. (2014). *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.
- Sedarmayanti. 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan Industri pariwisata*. Revika Aditama. Bandung
- Widyarini 2013. *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*. EKBISI, Vol. VIII, No. 1, Desember 2013, hal. 1 – 12 ISSN:1907-9109
- Yan Megawandi. (2013). *Koordinasi Antar Organisasi Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Desertasi. Unpad Bandung.
- Crescent Rating, 2015 diakses melalui <https://www.crescentrating.com/> pada tanggal 1 Mei 2016
<http://digilib.uinsby.ac.id> tanggal akses 3 mei 2016
- Lady Yulia. (2015). *Halal Lifestyle Makin Mendunia*. Makalah diunggah di website resmi kemenag
<http://bimasislam.kemenag.go.id-informasi-opini>.
www.parekraf.go.id diakses pada 01 Mei 2017
- Internet**
- Crescent Rating, 2015 diakses melalui <https://www.crescentrating.com/> pada tanggal 1 Mei 2016
<http://digilib.uinsby.ac.id> tanggal akses 3 mei 2016
- Lady Yulia. (2015). *Halal Lifestyle Makin Mendunia*. Makalah diunggah di website resmi kemenag
<http://bimasislam.kemenag.go.id-informasi-opini>.
www.parekraf.go.id diakses pada 01 Mei 2016